

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hajati, et.al., Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, Kencana-Prenadamedia, Jakarta, 2021
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ismaya. Samun, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, 2013
- Muchsin. Imam Koeswahyono, Hukum Agraria Indonesia Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Sudaryatmi, Sri. Sukirno, T H., Sri Kartini, Beberapa Aspek Hukum Adat, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000
- Thamrin. Husni, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011. Winarsi, Sri. Wilda Prihatiningtyas, Buk

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tnetang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

JURNAL

Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4.

Agus Sekarmadji, "Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Partikelir", *Notaire*, Vol. 6, No. 1.

Bunga Desyana P, Rindiana Larasari, Sri Rat, Iqbal Kamalludin, "Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021", *Officium Notarium*, Vol 1 No 2.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali", *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Iga Gangga Santi Dewi, "Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah", *Jurnal Unnes Pandecta*, Vol 5 No 2.

Ilona Miranda Tuhuleruw, Andress Deny Bakarbessy, Merlien Irene Matitaputty, "Penyalahgunaan wewenang Kepala Desa Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 9.

Ilyas Ismail, "Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan", *XIII Kanun Jurnal Ilmu Hukum*